

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI KASUS PENERTIBAN RUMAH LIAR DI KOTA BATAM)

Oleh:

Nuryana

(email: yanayanis@yahoo.co.id)

Pembimbing: Dr. Febri Yuliani, S.sos, M.Si

(email: febby_sasha@yahoo.co.id)

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Negara-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Implementation Local Regulation No. 16 of 2007 On Public Order (The Case Study is Control of Illegal Houses in Batam) This research aims to identify and analyze the implementation of the local Regulation on Public Order No. 16 of 2007 in Batam, (The Case Study is Control of Illegal Houses in Batam). And then this research can know analyzed the factors that hindrance the implementation of the Local Regulation on Public Order No. 16 of 2007 in Batam (The Case Study is Control of Illegal Houses in Batam). This research is a qualitative research and the technique of snowball sampling. The results showed that the implementation of the Local Regulation on Public Order No. 16 of 2007 in Batam, it was conducted by the Civil Service Police Unit. But never an absolute order, the Batam residents still live or re-live the illegal of houses region. There are still many problems that arise in that implementation. the factors that hindrance the implementation of enforcement among, namely: basic sizes and policy objectives, policy resources, communication between organizations and implementing activities, characteristics of implementing agencies, economic, social and political conditions, as well as the tendency executor.

Keyword: Peraturan Daerah (Local Regulation), Ketertiban Umum (Public Order), Implementasi (Implementation), Rumah Liar (The Illegal house)

PENDAHULUAN

Kota Batam merupakan kota yang terletak pada lokasi yang regional yaitu sebagai salah satu gerbang di wilayah propinsi Kepulauan Riau dan lingkup internasional telah menjadikan Kota Batam

sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi sekaligus pusat transit barang (perdagangan), yang mana telah mendorong para investor asing menanamkan modalnya, terbukanya lapangan kerja serta UMR Kota Batam yang cukup tinggi (sebesar Rp. 2.420.000,-) menjadikan dampak banyaknya imigran yang coba mengadu nasib ke Kota Batam.

Visi Kota Batam “ Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional.” Juga membuat pemerintah berupaya keras mewujudkannya di tengah banyaknya permasalahan yang sedang dihadapi Kota Batam dalam perjalanan proses pengembangannya. Mulai dari masalah kelembagaan yang di awal masih terdapat dualisme kewenangan antara BP Batam dan pihak Pemerintah Kota yang pada akhirnya pada tahun 1999 membuat Pemerintah Kota Batam berbagi kekuasaan dengan Otorita Batam (yang sekarang disebut sebagai Badan Pengusahaan dan Pengembangan Investasi Kota Batam atau lebih dikenal sebagai BP Batam) dalam melakukan pengembangan di Kota Batam.

Selain itu permasalahan yang dihadapi Kota Batam antara lain penyediaan air bersih, kerusakan mangrove, serta tumbuh subur dan tidak terkendalinya Ruli, Rumah Liar di Kota Batam.

Patrick McAuslan (1986) dalam **Purnawan (2004:11)** menyatakan sebutan pemukiman liar sebenarnya tidak mengandung suatu kecenderungan kriminal, tetapi hanya menunjukkan hubungan antara kelompok orang dan perumahan di atas tanah tertentu, maksudnya seorang pemukim liar adalah seorang yang menempati sebidang tanah, sebuah rumah, atau sebuah bangunan tanpa kekuatan hukum.

UN Habitat (2003) dalam **Darrundono (2007:10)** menyatakan bahwa pemukiman liar merupakan produk kebijakan yang gagal, tata pemerintahan yang buruk, korupsi, peraturan yang berbelit-belit, pasar pertanahan yang tidak berfungsi, sistem keuangan yang tidak jelas, dan kemauan politik yang lemah.

Dimana kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau

sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan, amat sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Dimana implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam sebuah kebijakan. Tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan dari undang-undang. Secara luas implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program.

Van Meter dan Van Horn dalam **Budi Winarno (2012:149)**, mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis.

Menurut **Riant Nugroho (2012:674)** menerangkan bahwa dalam perencanaan atau suatu kebijakan yang diformulasikan dengan baik akan menentukan hasil yang baik, yang merupakan faktor ke-60% dari keberhasilan suatu kebijakan. Didukung dengan telah mempunyai konsep yang baik

dalam sebuah kebijakan yang telah melewati tahap perencanaan.

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan peluang yang 60% tersebut akan hangus jika sisa faktornya yakni 40% atau malah hanya berkisar 10-20% saja yang berupa sebuah implementasi yang berjalan tidak konsisten dengan perencanaan sebelumnya.

Implementasi kebijakan pada perinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan publik. Ada dua langkah pilihan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan pada perinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan publik. Ada dua langkah pilihan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut

Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks. Yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Dibalik kerumitan dan kompleksitasnya implementasi memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya sebuah implementasi didalam sebuah kebijakan yang ada, maka program-program dari kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi saja yang tidak memiliki fungsi yang sebenarnya dan menjadi program semata tanpa pernah dijalankan.

Didalam mengkaji sebuah proses implementasi tentunya melihat dan menemukan kendala-kendala yang timbul dalam proses implementasi. Dengan melihat

kendala yang terjadi maka tentunya menjadi gambaran kedepan oleh pihak terkait untuk memperbaiki kekurangan selama proses dalam implementasi itu berlangsung.

Namun tidak jarang kekurangan dalam proses implementasi dibiarkan berlarut-larut oleh Pemerintah. Tidak melakukan perubahan atau kurang tanggap akan proses implementasi tersebut. Dalam *implementasi publik* mengenal *implementation myopia*, dimana sebuah implementasi yang hanya dilakukan terus menerus tanpa pernah menyadari akan adanya kekurangan bahkan kesalahan yang pernah terjadi.

Tiga miopia implementasi kebijakan tersebut adalah:

1. Selama ini sebagian besar risorsis kita habiskan untuk membuat Perencanaan, namun tidak cukup untuk bagaimana melaksanakannya.
2. Selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah diputuskan diundangkan, lantas rakyat diangkap tahu, dan kalau salah langsung hukum.
3. Selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah dibuat, implementasi akan berjalan dengan sendirinya.

Dalam visi misi melekat dengan kemana akan pergi, apa tujuan dari sebuah organisasi atau instansi pemerintah tersebut. Strategi-pun akan membantu dalam menentukan apa yang harus dilakukan melalui proses perencanaan sebelum kebijakan itu lahir sampai akhirnya berjalan sesuai dengan program atau yang kita kenal dengan implementasi.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan daerah adalah sebuah kebijakan publik yang memiliki penjelas atau yang sering disebut dengan peraturan pelaksanaan. Maka kebijakan publik tersebut dapat berjalan langsung atau beroperasional.

Ruli merupakan istilah populer, singkatan yang dipakai untuk Rumah Liar di

Kota Batam. Rumah liar adalah salah satu fenomena yang terjadi di kota Batam di samping pembangunan Kota Batam itu sendiri. Jika kita berkendara dari satu tempat ke tempat lainnya di Kota Batam, akan sangat mudah menemui Rumah Liar.

Ruli menempati lokasi yang berdekatan dengan tempat kerja para penghuninya sehingga sangat mudah dikenali. Jika lokasi tersebut memiliki pabrik-pabrik yang memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar, pasti di sekitar lokasi akan bermunculan ruli untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal para pekerja industri bersangkutan. Para penghuni ruli pun tidak hanya terbatas pada para pekerja sektor industri namun juga orang-orang yang bekerja di sektor informal yang mendukung adanya industri.

Dengan keterbatasan yang dimiliki, ruli menempati lahan-lahan yang tidak seharusnya ditempati. Ruli dipilih sebagai tempat tinggal dengan beragam pertimbangan, antara lain karena sewa lahan/rumah yang tinggi, harga rumah yang tidak terjangkau, serta efisiensi yang mereka dapat. Para penghuni ruli beranggapan bahwa dengan membangun ruli, berarti mereka tidak mengeluarkan uang untuk lahan, mereka hanya mengeluarkan uang untuk bangunannya saja.

Konstruksi jalan di lingkungan ruli hanya berupa perkerasan seadanya dan terlihat beberapa bagiannya rusak. Tingkat kemiringan jalan cukup tinggi, menggambarkan kondisi yang pasti sangat licin di waktu hujan. Kondisi jalan licin mengancam tingkat keselamatan individu.

Kemudian salah satu yang juga menjadi alasan penduduk ruli tetap betah tinggal di tempat pemukiman liar tersebut disebabkan oleh kelengkapan bangunan, contohnya saja Pemukiman liar di Kampung Seraya Atas, dimana sebagian besar Ruli didirikan setengah permanen hingga

permanen yang telah memiliki jaringan listrik dari PLN secara sah yang merupakan bantuan salah satu anggota serta calon anggota lembaga legislatif Kota Batam padahal seharusnya para penduduk yang menempati rumah liar tidak bisa mendapatkan jaringan PLN karena mereka berada di kawasan perumahan liar.

Perkembangan rumah liar bila dilihat dari tempat Pemerintah Kota Batam bukannya tidak pernah melakukan usaha penertiban kawasan ruli yang tersebar di Kota Batam, Bahkan Pemerintah telah memasukkan masalah ruli ini dalam Peraturan Daerahnya. Dimana Keberadaan Ruli ini telah melakukan pelanggaran pada beberapa pasal yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum pasal 3 yaitu “Setiap orang dilarang bertempat tinggal/tidur/berjualan diatas atau dibawah jembatan, jembatan penyebrangan, halte, terminal, trotoar, median jalan kecuali untuk kepentingan jalan”, Pasal 7 yang mengatakan “Setiap orang dilarang beternak, bercocok tanam, bertempat tinggal atau tidur di tanggul, bantaran sungai, pinggir kali dan saluran, dam/waduk dan daerah tangkapan air.” dan pasal 16 b “Setiap orang/badan hukum dilarang mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, daerah tangkapan air, dan atau bantaran/diatas saluran/sungai, kecuali untuk kepentingan dinas, dan fasilitas umum.” Disana sudah terlihat jelas bahwa adanya larangan untuk tidak mendirikan hingga bertempat tinggal pada daerah yang bukan diperuntukan bagi pemukiman warga. tetapi jumlah rumah liar yang berada di Daerah Tangkapan Air (DTA) Duriangkang yang pada tahun 2012 hanya sebanyak 312 ruli meningkat pada tahun 2013 menjadi 520 rumah liar dan rumah liar yang berada di row jalan dan fasilitas umum pada tahun 2012 hanya sebanyak 1320 ruli meningkat pada tahun 2013 sebanyak 1650 rumah liar

yang tersebar di Kota Batam. (*Sumber Satuan Polisi Pamong Praja, Data rumah liar tahun 2012 dan tahun 2013*)

Pemerintah Kota telah berulang kali melakukan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) maupun instansi terkait. Sebagaimana yang terdapat dalam Perda Kota Batam Nomor 16 tahun 2007 dalam Pasal 1 ayat 1 menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja menjadi perangkat daerah yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana ketertiban dan ketentraman serta fungsi pengamanan Peraturan Daerah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selain itu mengingat luas Batam dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi hingga dualisme kelembagaan yang terjadi di Batam maka diperlukan juga koordinasi dengan instansi terkait yang dinyatakan pada pasal 26 ayat 1 bahwa “Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan–ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau sebutan lainnya, dan dapat dibantu oleh aparat lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku” dan banyaknya ruli yang tersebar sehingga berkoordinasi dengan pihak perlu melakukan penertiban pasal 26 ayat 2 “Penindakan atas pelaksanaan ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau sebutan yang lainnya, dan dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lainnya, serta dapat dibantu oleh aparat lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Contohnya saja Satpol PP yang berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota atau Badan pemerintah yaitu BP Batam melalui Direktorat Badan Pengamanan hingga melalui Tim Terpadu yang didasarkan pada surat keputusan bersama yang bersifat koordinatif.

Permasalahan keberadaan rumah liar (ruli) dengan situasi masalah yang dihadapinya ini, dimana disatu sisi sebagai

solusi untuk mengatasi masalah tempat tinggal penduduk (perumahan) yang mahal, namun pada sisi lain fenomena rumah liar telah banyak menyita perhatian. Karena persoalan mengenai rumah liar sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, keindahan, kebersihan serta memberi dampak negatif terhadap tata ruang kota, secara umum dampak yang diakibatkan adalah degradasi lingkungan hidup ini merupakan penurunan kualitas lingkungan itu sendiri. Masalah – masalah yang timbul dapat dilihat dari ruang terbuka hijau yang semakin berkurang, drainase semakin buruk, sirkulasi terganggu, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, dimana peneliti hanya memaparkan situasi atau peristiwa tanpa mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Akan tetapi, penelitian kualitatif ini mencari hubungan antara fenomena-fenomena yang ada berdasarkan data informasi yang dikumpulkan serta berpedoman pada landasan teori dan kebijakan yang menjadi gambaran lengkap mengenai objek penelitian dan fenomena-fenomena yang melingkupinya sehingga diperoleh penjelasan dari pokok permasalahannya serta membantu mencari pemecahan yang baik dan tepat terhadap masalah tersebut. Setelah menjawab dan memecahkan masalah tersebut dengan pemahaman secara menyeluruh, selanjutnya penulis memberikan penilaian terhadap jawaban informan melalui wawancara dan observasi sehingga menghasilkan kesimpulan terhadap objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, melihat implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Studi Kasus Penertiban rumah liar di Kota Batam, yang menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam model implementasi yang mempengaruhi implementasi ada enam variabel.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telah sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam peraturan daerah dan perintah oleh kepala daerah serta juga beberapa aduan yang disampaikan oleh beberapa pihak kepada mereka. Hal ini di pengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan, dimana anggota yang turun ke lapanganpun sebelumnya diinstruksikan oleh Kasi Operasi dan Pengendalian yang dilakukan melalui proses Apel. Pada dasarnya para anggota satuan polisi pamong praja tersebut hanya menjalankan tugas. SOP dalam menjalankan tugas adalah bersifat Nasional, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam belum memiliki SOP sendiri sehingga membuat Satpol PP hanya berpedoman kepada SOP yang bersifat nasional. Yang pada kenyataannya tidak sesuai untuk dijalankan dalam penertiban rumah liar di Kota Batam. Selain itu faktor lain yang terjadi dalam proses implementasi adalah jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang sangat kecil, yakni 100 orang. Hal ini juga yang mempengaruhi proses pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dalam melakukan penertiban rumah liar. Karna tidak adanya acuan tertulis dan tentunya resmi dalam menjalankan tugas. Sehingga sedikit berdampak ketika melakukan

operasi kelapangan yang tentunya dirasakan oleh warga ruli.

2. Sumber-sumber kebijakan bila dilihat dari luas daerah Kota Batam yang menjadi tanggung jawab mereka dalam usaha penertiban tidak berbanding dengan jumlah anggota yang dimiliki. Menurut Kasubbag. Umum dan Kepegawaian, Satpol PP membutuhkan sedikitnya 1000 anggota Polisi Pamong Praja. Untuk masalah kurangnya anggota sudah disampaikan kepada kepala daerah. Anggota pamong praja sendiri dibagi dalam tiga regu setiap harinya untuk berpatroli pada kawasan row jalan, DTA hingga fasilitas umum dan sosial serta kawasan yang ditunjuk oleh kepala daerah yang memang harus diperhatikan ketertibannya.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana dilihat dari sisi Satpol PP melakukan tugasnya setiap hari beroperasi dalam menertibkan rumah liar yang berada pada kawasan yang bukan diperuntukkan bagi kawasan pemukiman penduduk oleh RTRW. Sesuai dengan arahan yang diberikan dalam apel sebelum turun beroperasi. Namun warga ruli yang telah ditertibkan, malah kembali membangun rumah pada kawasan yang seharusnya tidak boleh ditempati sebagai kawasan pemukiman, begitu seterusnya. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap larangan merupakan kendalanya. Pemerintah pun kurang peka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, komunikasi dalam pelaksanaan juga kurang tertata dengan baik dan kondusif. Baik itu dengan para pegadang kaki lima maupun instansi terkait didalamnya.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana, dimana Satpol PP merupakan organisasi pemerintah atas perintah dari Walikota, dan sebelumnya dalam persetujuan Kasi

operasi dan pengendalian. Tentunya mereka bekerja atas perintah. Ketika turun kelapangan pun mereka memiliki prosedur dan tahap-tahapnya sebelum sampai ketahap penindakan atau eksekusi. Ketika dilapangan yang terjadi menurut yang diutarakan para warga ruli adalah mereka tidak menerima pemberitahuan terlebih dahulu. Dan hasilnya tentu adalah pesan atau prosedur satpol pp tidak sampai pada sasarannya.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik, dimana Pemerintah Kota Batam tidak memberikan alternatif kepada Warga ruli, dimana sebuah solusi yang tidak hanya menguntungkan untuk ketertiban Kota Batam, tetapi juga menguntungkan untuk para warga ruli. Sehingga sebuah alternatif yang bisa menjadikan masalah ruli tidak berlarut-larut. Karena pertumbuhan rumah liar yang tentunya tidak mungkin bisa dibendung. ditambah pertumbuhan serta kebutuhan ekonomi terutama masyarakat yang semakin meningkat.
6. Kecendrungan pelaksana, dimana perda ini hanya bersifat umum yang tidak memiliki aturan yang jelas mengenai penertiban rumah liar tentunya menjadi faktor yang mengakibatkan kaburnya proses implementasi peraturan daerah mengenai ketertiban umum.

Faktor penghambat dalam mengimplementasikan Perda Nomor 16 Tahun 2007, dimana Peraturan daerah tersebut juga dibuat sudah lama. Tentunya dalam perubahan waktu terjadi pula perubahan kebutuhan yang disebabkan oleh kemajuan Kota Batam yang terus berkembang sehingga tidak sesuai lagi dengan pasal dan butir-butir ayat dalam peraturan daerah tersebut.

Dengan kelemahan tersebut, pedoman dalam proses pelaksanaan ketertiban umum. Peraturan daerah yang

sudah lama dan tidak diperbaharui ditambah kurang jelasnya garis merah, aturan-aturan yang dituangkan didalamnya dan yang paling penting adalah tidak jelasnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar dari peraturan tersebut. Baik itu berupa denda maupun hukuman lainnya.

Selain itu kurangnya sumber daya yang dianggap sebagai penunjang implementasi kebijakan serta kondisi ekonomi, sosial dan politik pada warga ruli sebagai sasaran penertiban rumah liar juga menyulitkan Satpol PP melaksanakan penertiban dengan baik yang kemudian berpengaruh pada proses implementasi sehingga memerlukan koordinasi oleh instansi yang terkait dalam proses penertiban warga ruli.

SIMPULAN

Implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam menertibkan rumah liar di Kota Batam tidak dapat terlaksana dengan baik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor, yaitu: Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta kecenderungan pelaksana.

Sehingga didapat faktor yang menjadi kendala dalam mengimplementasi perda ketertiban umum dalam menertibkan rumah liar di Kota Batam, antara lain: Peraturan daerah yang sudah lama dan tidak diperbaharui ditambah kurang jelasnya garis merah, aturan-aturan yang dituangkan didalamnya serta sanksi yang tidak tegas terhadap para pelanggar peraturan daerah ini. dan juga masalah yang dihadapi oleh Satpol PP sebagai pelaksana dan penegakan perda ini seperti kurangnya sumber daya yang dianggap sebagai penunjang implementasi kebijakan serta kondisi ekonomi, sosial dan politik pada warga ruli sebagai sasaran penertiban rumah liar juga

menyulitkan Satpol PP melaksanakan penertiban dengan baik yang kemudian berpengaruh pada proses implementasi sehingga memerlukan koordinasi oleh instansi yang terkait dalam proses penertiban warga ruli.

SARAN

Dengan hasil penelitian yang telah disimpulkan dalam implemenasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang ketertiban umum studi kasus penertiban rumah liar. Yang tentunya mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Telah dipaparkan dalam kesimpulan. Maka saran yang dapat diberikan peneliti kepada Pemerintah Kota Batam dan instansi terkait, antara lain:

1. Pembaharuan Peraturan Daerah, diperlukan pembaharuan atau revisi terhadap perda karena perda yang ada saat ini sudah cukup lama. Dalam prosesnya saat ini telah banyak perubahan yang terjadi di Kota Batam. Diperlukan perda ketertiban umum yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan.
2. Memberikan pemahaman tentang perda kepada pemerintah sendiri selaku implementor dan kepada masyarakat serta diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dalam melakukan ketertiban umum dalam hal ini penertiban rumah liar.
3. Memberikan solusi kepada warga ruli dengan melakukan relokasi ke tempat atau wilayah yang memang diperuntukkan bagi kawasan pemukiman atau perumahan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka serta sesuai juga RTRW Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Darrundono. 2007. *Perkotaan dan Kependudukan di Indonesia*, Bayumedia Publishing: Malang.
- Nugroho D, Riant. 2012. *Public Policy (Dinamika, Analisa dan Manajemen Kebijakan)*, Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Purnawan. 2004. *Gambaran Perkotaan di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. CAPS: Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RPMJD) Kota Batam Tahun 2011-2016*
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Tahun 2002
- Hari Srinivas. 2007, *Defining Squatter Settlement*, <http://www.gdrc.org/uem/defin-esquatter> Di akses pada tanggal 11 April 2013
- . 2007, *Slum, Squatter Areas and Informal Settlement*, *9th International Conference On Sri Lanka Studies, Matara, Sri Lanka, Arawinda Nawagamuwa and Nils Viking*. di akses pada tanggal 11 April 2013